

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menyebabkan PT. Mega Transformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja, disamping itu penelitian ini juga Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Notaris dalam perubahan PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis proses hambatan dan solusi dalam proses perubahan PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana peran Notaris memerlukan penelitian empiris terhadap Notaris yang memproses perubahan nama-nama Pemegang saham serta pergantian Direksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Peran dan kewenangan notaris dalam menghadapi masalah akta perubahan anggaran dasar Notaris tetap mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyarankan kepada pihak perseroan untuk melakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini kewajiban notaris tidak semata-mata merumuskan atau menformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan atau dirumuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus meneliti segala hal yang berkenaan dengan prosedur permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Salah satu dalam kasus ini adalah administrasi para pemegang saham yang harus lengkap sebagai syarat perubahan sebuah PT. Apabila terbukti proses pelaksanaan pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut dan semua tindakan pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cara hukum. Dalam hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan keputusan RUPS yang menegaskan kembali berdasarkan hasil keputusan yang sudah disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang bersifat redaksional. Selanjutnya notaris dapat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kembali ke Menteri Hukum dan HAM berdasarkan persetujuan tersebut

Kata kunci : Peranan, Notaris dan Perseroan Terbatas

Abstraction

This study aims to determine and analyze the factors that cause PT. Mega Transformation Indonesia turned into PT. Djaja Bangun Rahardja, besides that this research is also to find out and analyze the role of the Notary in changing PT. Mega Transformation of Indonesia into PT. Djaja Bangun Rahardja was connected with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the last one was to identify and analyze the process of obstacles and solutions in the process of changing PT. Mega Transformation of Indonesia into PT. Djaja Bangun Rahardja is associated with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

*The approach method in this research is empirical juridical. The juridical approach (law is seen as a norm or *das sollen*), because in discussing the problem this research uses legal materials (both written law and unwritten law or both primary legal materials and secondary legal materials). Empirical approach (law as a social, cultural or *das sein* reality), because this research uses primary data obtained from the field. So, the empirical juridical approach in this study means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely about how the role of Notaries requires empirical research on Notaries who process changes in names, names of shareholders and changes to the Board of Directors.*

Based on the results of this study, it can be concluded that the role and authority of the notary in dealing with the problem of the amendment to the notary's articles of association remains fundamental to the prevailing laws and regulations by suggesting to the company to re-conduct the General Meeting of Shareholders. In this case, the notary's obligation is not merely to formulate or formulate everything discussed or formulated in the GMS and then put it in an authentic deed, but the Notary as a public official who is given the authority and trust by law must examine all matters relating to the procedure. application for approval or notification of amendments to the articles of association to the Minister. One of them in this case is the administration of the shareholders which must be complete as a condition for changing a PT. If it is proven that the process of submitting the amendment to the articles of association of the company does not meet the requirements and procedures specified in the law or the articles of association of the company, it will result in legal consequences for the company and all acts of submitting the amendment to the articles of association will be legal. In this case the Notary should make a deed of confirmation based on the GMS decision which reaffirms based on the results of the decisions that have been agreed upon in the previous GMS and at the same time corrects editorial errors. Furthermore, the notary can apply for approval and re-notice to the Minister of Law and Human Rights based on the agreement.

Keywords: Role, Notary and Limited Liability Company